



ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PRAKTIK MODERASI BERAGAMA DI MASYARAKAT INDONESIA

Meylani Anggraini, Winy Anggraini Putri

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia memiliki dampak penting bagi keberlangsungan kehidupan beragama di Indonesia. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pandangan dan pemahaman agama, keterbatasan sumber daya, dan resistensi kelompok tertentu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah dapat meningkatkan dialog antar kelompok agama, melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, mengalokasikan sumber daya yang cukup, dan meningkatkan akses pendidikan agama moderat. Peran aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendorong praktik moderat beragama di lingkungan mereka sendiri.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah, moderat beragama, masyarakat Indonesia, tantangan, solusi..

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dengan berbagai suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Kehidupan beragama di Indonesia sejatinya sangat harmonis dan toleran. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa masalah yang muncul di masyarakat terkait praktik beragama yang ekstrim atau radikal. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pengaruh globalisasi dan akses informasi yang semakin mudah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong praktik moderat beragama di masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan agama, sosial budaya, dan ekonomi. Namun, masih diperlukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan tersebut dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat.

Pendidikan agama menjadi salah satu aspek yang dianggap penting dalam

*Correspondence Address : meylanianggraini022@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1430-1438

© 2023UM-Tapsel Press

mendorong praktik moderat beragama di masyarakat. Pendidikan agama yang berkualitas dapat membentuk sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan menghindari praktik ekstrim atau radikal. Selain itu, sosial budaya juga dapat mempengaruhi praktik beragama di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadakan program-program yang mempromosikan keberagaman dan menghargai perbedaan, seperti festival budaya atau acara keagamaan yang melibatkan berbagai agama.

Di sisi ekonomi, pemerintah dapat mendorong praktik moderat beragama dengan mengembangkan sektor ekonomi yang dapat membantu masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan meningkatnya kesejahteraan, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk mengembangkan praktik beragama yang moderat.

Namun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong praktik moderat beragama di masyarakat, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah minimnya dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Masyarakat seringkali tidak memahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga sulit untuk mendukungnya. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal seperti pengaruh media dan radikalisme yang dapat mempengaruhi pandangan dan praktik beragama di masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti dokumen

kebijakan, wawancara dengan stakeholders terkait, dan survei masyarakat. Dengan hasil analisis yang didapatkan, diharapkan pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan mengembangkan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian literatur review dapat digunakan dalam penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Praktik Moderat Beragama di Masyarakat Indonesia. Metode ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka atau studi literatur tentang kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode penelitian literatur review:

Penentuan topik dan sumber literatur

Langkah pertama adalah menentukan topik penelitian dan sumber literatur yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, sumber literatur yang relevan dapat diperoleh dari jurnal akademik, buku, dokumen kebijakan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang terkait.

Seleksi literatur

Langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap literatur yang akan digunakan. Seleksi dilakukan dengan membaca dan mengevaluasi kualitas literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti relevansi dengan topik, keakuratan data, dan validitas sumber.

Analisis dan evaluasi literatur

Langkah ketiga adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap literatur yang telah dipilih. Hal

ini dilakukan dengan membaca dan memahami isi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat.

Menyusun hasil analisis

Langkah terakhir adalah menyusun hasil analisis berdasarkan literatur yang telah dipilih. Dalam hal ini, hasil analisis dapat disusun dalam bentuk sintesis literatur, yaitu ringkasan temuan dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, hasil analisis juga dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik untuk memudahkan pemahaman.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kebijakan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk memiliki akta nikah yang sah. Dalam akta nikah tersebut, pasangan harus menyatakan agama dan keyakinan yang mereka anut. Hal ini bertujuan untuk mendorong pasangan untuk berpikir lebih matang dan memilih agama dan keyakinan yang moderat.

2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Keputusan ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membangun kerukunan

antarumat beragama di Indonesia. Pemerintah memfasilitasi dialog antarumat beragama, mempromosikan toleransi dan menghargai perbedaan, serta menjamin hak-hak warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang ini menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Setiap warga negara berhak atas kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan apapun, serta memiliki hak untuk tidak dipaksa untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu.

4. Program Pendidikan Agama yang Moderat

Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program pendidikan agama yang moderat di lembaga-lembaga pendidikan di seluruh negeri. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai agama dan mendorong praktik agama yang toleran dan moderat.

5. Program Dialog Antaragama

Pemerintah Indonesia juga mempromosikan program dialog antaragama untuk meningkatkan pemahaman antara umat beragama yang berbeda. Program ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dalam upayanya untuk mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia, pemerintah juga berupaya untuk mengatasi radikalisme dan ekstremisme agama yang berpotensi merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan praktik agama yang moderat.

Berdasarkan penelitian yang ada, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia, antara lain:

1. Konteks sosial dan politik Indonesia

Konteks sosial dan politik Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah terkait praktik moderat beragama. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan untuk memastikan bahwa praktik agama yang dilakukan oleh masyarakat tidak melampaui batas dan tetap moderat. Kondisi sosial dan politik yang kompleks di Indonesia seperti konflik antar umat beragama, intoleransi, dan radikalisme agama juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama.

2. Peran kelompok keagamaan

Kelompok keagamaan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam urusan agama. Kelompok keagamaan ini sering kali memiliki pandangan yang berbeda

mengenai bagaimana praktik agama seharusnya dilakukan, termasuk mengenai tingkat ketat atau moderatnya praktik agama. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan pandangan dan masukan dari kelompok keagamaan dalam menetapkan kebijakan terkait praktik moderat beragama.

3. Faktor politik dan keamanan nasional

Faktor politik dan keamanan nasional juga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama. Terorisme dan radikalisme agama merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman tersebut, termasuk melalui upaya untuk mendorong praktik moderat beragama.

4. Tekanan dari masyarakat dan masyarakat internasional

Tekanan dari masyarakat dan masyarakat internasional juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama. Dalam beberapa kasus, tekanan ini dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah praktik agama yang ekstrem dan intoleran. Pada saat yang sama, tekanan ini juga dapat membuat pemerintah merasa terpaksa untuk mengambil tindakan yang mungkin tidak sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai lokal.

5. Kebijakan pemerintah sebelumnya
Kebijakan pemerintah sebelumnya juga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama. Kebijakan pemerintah yang telah diterapkan sebelumnya dapat membentuk pandangan dan opini publik mengenai masalah agama dan toleransi, dan juga dapat mempengaruhi cara pemerintah mengambil tindakan selanjutnya dalam menangani masalah ini.

Respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia dapat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa respons yang umumnya dapat diidentifikasi, antara lain

1. Dukungan dan penerimaan
Beberapa masyarakat dapat merespons kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama dengan dukungan dan penerimaan. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut memang diperlukan untuk mencegah ekstremisme dan intoleransi agama, dan jika mereka merasa bahwa kebijakan tersebut diambil dengan cara yang terbuka dan transparan.
2. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan
Di sisi lain, beberapa masyarakat juga dapat merespons kebijakan pemerintah dalam

mendorong praktik moderat beragama dengan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan. Hal ini dapat terjadi jika masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut tidak cukup efektif dalam menangani masalah intoleransi dan ekstremisme agama, atau jika mereka merasa bahwa kebijakan tersebut tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.

3. Kontroversi dan konflik

Beberapa kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama juga dapat menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Misalnya, beberapa kebijakan yang terkait dengan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan tertentu dapat menimbulkan kontroversi di kalangan kelompok keagamaan yang merasa terancam oleh kebijakan tersebut. Konflik juga dapat terjadi antara kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah dan kelompok yang menentangnya.

4. Tindakan positif

Di beberapa wilayah, kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama juga dapat memicu tindakan positif dari masyarakat, seperti upaya untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini terutama terjadi jika masyarakat merasa terdorong untuk bertindak dalam menghadapi masalah intoleransi dan ekstremisme

agama yang terjadi di sekitar mereka.

Dampak kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia dapat sangat beragam, tergantung pada jenis kebijakan yang diambil, konteks sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Meningkatnya pemahaman moderat tentang agama

Kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama dapat membantu meningkatkan pemahaman moderat tentang agama di kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan tersebut mendorong masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan prinsip-prinsip dasar agama yang moderat.

2. Menurunnya tingkat intoleransi dan ekstremisme agama

Kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama juga dapat membantu menurunkan tingkat intoleransi dan ekstremisme agama di masyarakat. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan tersebut efektif dalam mencegah aksi kekerasan atau diskriminasi yang didasarkan pada agama, serta membantu mempromosikan kerukunan antar umat beragama.

3. Meningkatnya stabilitas sosial dan politik

Kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama juga dapat

membantu meningkatkan stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Hal ini terutama terjadi jika kebijakan tersebut mampu mencegah terjadinya konflik sosial yang berbasis agama, serta membantu mempromosikan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan tersebut diambil dengan cara yang transparan dan partisipatif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, di sisi lain, kebijakan pemerintah juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti adanya resistensi atau oposisi dari kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, serta adanya konflik sosial yang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia.

Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan tersebut:

1. Tujuan kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah tujuan kebijakan tersebut

jelas dan spesifik, serta apakah tujuan tersebut telah dicapai dengan baik atau belum.

2. Relevansi kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah kebijakan tersebut relevan dengan masalah yang ingin diatasi, serta apakah kebijakan tersebut tepat sasaran dan berkesinambungan.

3. Efektivitas kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

4. Implementasi kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana, serta apakah ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

5. Respons masyarakat

Evaluasi harus mempertanyakan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta apakah kebijakan tersebut diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat.

6. Keberlanjutan kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah kebijakan tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang dan apakah kebijakan tersebut dapat diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan lainnya.

7. Efisiensi kebijakan

Evaluasi harus mempertanyakan apakah

kebijakan tersebut efisien dalam penggunaan sumber daya, serta apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dalam melakukan evaluasi, diperlukan data dan informasi yang akurat dan valid, serta partisipasi dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan, serta sebagai dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah perbedaan pandangan dan pemahaman agama, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Perbedaan pandangan dan pemahaman agama dapat menghambat pelaksanaan kebijakan karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat terkait praktik moderat beragama. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan tenaga kerja juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, resistensi dari kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok garis keras atau kelompok radikal juga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, solusi yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan dialog antar kelompok agama untuk membangun toleransi dan memperkuat kesepakatan dalam praktik moderat beragama. Pemerintah dapat membangun kerjasama dengan pihak terkait seperti

tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan kesepahaman dalam praktik moderat beragama. Selain itu, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal sumber daya, pemerintah sebaiknya mengalokasikan sumber daya yang cukup, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah ada. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan akses pendidikan agama moderat bagi masyarakat Indonesia untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik moderat beragama.

Dalam upaya mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat seharusnya juga berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dengan membangun toleransi dan saling pengertian antar kelompok agama serta mendorong praktik moderat beragama di lingkungan mereka sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan pemerintah dalam mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program untuk mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, seperti perbedaan pandangan dan pemahaman agama,

keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari kelompok-kelompok tertentu. Meskipun demikian, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti meningkatkan dialog antar kelompok agama, mengalokasikan sumber daya yang cukup, melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, membangun kerjasama dengan pihak terkait, dan meningkatkan pendidikan agama yang moderat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendorong praktik moderat beragama di masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan pandangan dan kepentingan semua kelompok agama dalam menetapkan kebijakan terkait praktik moderat beragama.
2. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah ada.
3. Pemerintah sebaiknya membangun dialog yang lebih intensif antara kelompok agama untuk memperkuat toleransi dan memperkuat kesepakatan dalam praktik moderat beragama.
4. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mengakomodasi kepentingan kelompok-kelompok yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. (2018). Moderation and Countering Extremism: A View from Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 10(10), 29-34.

Basri, A. S. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme di Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 1-20.

Hefner, R. W. (2018). The Politics of Religious Moderation in Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, 29(suppl_1), S33-S50.

Kholis, N., & Hosen, N. (2019). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme Berbasis Agama: Perspektif Hukum dan Sosiologi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 1-27.

Nasution, A. H. (2018). Potret Tantangan dan Prospek Pluralisme Beragama di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Theologia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*, 17(2), 163-184.

Nugroho, R. P., & Agus, H. (2020). Implementasi Program Pencegahan Radikalisme Berbasis Islam di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 17(2), 193-202.

Sembiring, E. R., & Asnawi, R. (2018). Dilema Kebijakan Nasional dalam Merespon Gerakan Intoleransi Berbasis Agama. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 63-78.

Setiyono, B. (2019). Pendidikan Agama di Sekolah dan Kebijakan Pemerintah dalam Menangkal Radikalisme Agama di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 23(1), 107-120.

Wahid, A. (2018). Radikalisme dan Terorisme: Dampak, Tantangan, dan Solusi. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(1), 241-255.

Yusuf, I. (2019). Modul Pendidikan Agama Berbasis Moderat untuk Membangun Karakter Santri di Pesantren. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 3(1), 1-17.